

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam tatanan kehidupan keluarga dan sosial, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup keluarga, sosial yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan suatu bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang optimal baik fisik, mental sosial, maupun secara moral. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan jaminan kesejahteraan, dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif di atas, negara memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) terhadap hak-hak atas anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Demikian pula Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Komitmen ini menunjukkan bahwa Negara menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak, yang dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 30,1 persen atau 79,55 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Artinya bisa dikatakan bahwa satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Dalam beberapa kurun waktu ke depan diproyeksikan jumlah anak di Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Tantangan perlindungan anak sangat beragam,

mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran dan partisipasi anak dalam sektor kesehatan dan pendidikan.

Akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Mayoritas anak usia 5-17 tahun berstatus masih bersekolah (83,62 persen). Sisanya sebesar 12,69 persen anak tidak/belum bersekolah dan 3,70 persen anak berstatus tidak bersekolah lagi. Jika dilihat menurut tipe daerah, presentase anak usia 5-17 tahun yang berstatus masih bersekolah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 84,30 persen berbanding 82,85 persen. Sebaliknya anak yang tidak bersekolah lagi, di perkotaan persentasenya lebih kecil dibanding perdesaan, dengan angka 3,00 persen berbanding 4,48 persen. Kemudahan akses pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih lengkap dan memadai dibandingkan dengan di perdesaan diduga menjadi penyebab perbedaan tersebut (KPPPA dan BPS, 2019).

Salah satu permasalahan anak-anak yang membutuhkan strategi khusus dalam penanganannya adalah anak yang bekerja (pekerja anak). Jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (Susenas, 2019) menunjukkan bahwa pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019. Dari data tersebut, wilayah Jawa menempati jumlah tertinggi dibandingkan wilayah lainnya yaitu 565ribu pekerja anak, dengan kepemilikan ijazah SD 38%, ijazah SMP 45%, ijazah SMA 5% dan tidak punya ijazah sama sekali 12%. Selanjutnya Sumatera 445 ribu, Sulawesi 195 ribu, Nusra 122 ribu, Kalimantan 96 ribu, Papua 91 ribu, Bali 24 ribu dan Maluku 18 ribu, serta wilayah lainnya yang lebih rendah dari data wilayah di atas. Lebih dari separuh anak usia 10-17 tahun yang bekerja berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60,16 persen. Hal ini menunjukkan masih banyaknya anak-anak yang harus membagi perhatian dan waktunya untuk bekerja dan belajar maupun kegiatan lainnya, padahal seharusnya anak-anak tersebut hanya fokus pada pelajaran.

Seperti yang disampaikan di atas, pekerja anak yang sekolah umumnya tidak berprestasi baik, karena masih mengutamakan pekerjaannya dari pada sekolah, terutama pada anak yang sudah masuk pada usia remaja akhir, keberlanjutan sekolah semakin minim karena banyak industri atau pengguna

pekerja lainnya telah menyerap mereka sebagai pekerja. Seperti data yang dilihat dari angka partisipasi pendidikan (BPS, 2019) bahwa partisipasi terendah sekolah ada pada kategori anak usia 16-18 tahun.

Fenomena di atas menggambarkan masih banyak anak di Indonesia yang mengalami diskriminasi dalam kehidupannya, dalam istilah sosiologi dan psikologi kondisi tersebut disebut “deprivasi”. Teori depivasi relatif yang dikemukakan oleh Stouffer itu menekankan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan (*deprivasi*) dan kurang beruntung (*disadvantage*). Anak-anak yang besar dan tumbuh di lingkungan “deprivasi” disebut sebagai anak-anak “kurang beruntung”. Anak kurang beruntung (Edward, 1974) dianggap sebagai anak yang sulit mempersiapkan pendidikan seperti kebanyakan anak dari kalangan kelas menengah (*middle class*). Anak-anak ini biasanya kurang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang mapan dikarenakan mereka kurang mampu berkomunikasi. Selain itu, orang tua mereka cenderung berbicara dengan bahasa yang sederhana (verbal). Sisi positif yang mereka miliki adalah mudah akrab dengan orang yang baru dikenal. Mereka lebih cepat tanggap dalam sosialisasi dibandingkan dengan anak-anak yang berlatar belakang sosial menengah. Orang tua mereka lebih memperhatikan tingkah laku anak daripada nilai prestasi mereka.

Deprivasi budaya sangat dekat dengan kemiskinan, karena kebanyakan dari mereka hidup di perkotaan dan pedesaan yang kumuh. Anak yang mengalami deprivasi berasal dari keluarga yang tidak memberikan contoh yang seharusnya untuk perkembangan potensi anak-anak mereka. Berbanding terbalik dengan kalangan *middle class* (menengah) yang menganggap bahwa pendidikan dan cara membesarkan anak yang baik adalah sangat penting.

Keadaan anak-anak yang tidak beruntung ini masuk dalam karakteristik deprivasi budaya. Joseph (Jordan, 1974) menjelaskan bahwa deprivasi adalah keadaan yang mencegah orang mengembangkan potensinya lebih baik lagi baik secara fisik, emosional maupun intelektual. Deprivasi terlihat dalam banyak bentuk. Sebagai contoh, pengelolaan emosional, pencapaian pendidikan yang buruk, depresi dan putus asa. Bentuk deprivasi tersebut dapat ditemukan di semua tingkat masyarakat tidak hanya di kalangan orang miskin. Namun yang paling rentan mengalami deprivasi adalah mereka yang sudah di bawah tangga ekonomi

dan sosial. Selanjutnya Deprivasi budaya (DAS 1971) digambarkan pada individu atau kelompok yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara menyeluruh. Atau secara pragmatis, deprivasi budaya berarti kondisi tertentu yang memaksa individu-individu tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan kebebasan yang mayoritas dinikmati oleh masyarakat di lingkungan tersebut.

Deprivasi budaya memiliki dampak nyata pada anak usia 0-18 tahun, karena pada masa inilah anak berkembang dan mendapatkan model (contoh) sikap dan perilaku. Kekurangan contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan yang baik terjadi pada anak-anak deprivasi budaya, karena umumnya orang tua sebagai model (contoh) utama di lingkungan deprivasi budaya tidak dapat memberi contoh yang baik agar anak dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya. Gambaran orang tua di lingkungan deprivasi budaya tersebut banyak terjadi dan mudah dilihat pada lingkungan “miskin”, lingkungan yang tidak memikirkan bagaimana kehidupan menjadi lebih baik, atau perlu melakukan upaya dan mempelajari sesuatu agar keluar dari kondisi “miskin”, tapi menjalani hidup apa adanya dan bekerja pada apa yang dapat mereka bisa lakukan. Perilaku tersebut adalah budaya (kebiasaan) yang terjadi dalam kehidupan mereka dan akan dicontoh oleh generasi penerusnya.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa deprivasi budaya sangat berdampak pada pendidikan anak-anak yang mengalaminya, karena lingkungan deprivasi budaya tidak memprioritaskan pendidikan. Manfaat pendidikan untuk anak deprivasi budaya hanya untuk dapat membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan bekerja atau kegiatan yang menghasilkan uang adalah prioritas karena kondisi ekonomi mereka yang rendah. Anak di lingkungan deprivasi budaya yang bersekolah biasanya memiliki motivasi belajar yang rendah, seperti saat musim panen tiba, siswa lebih baik ikut memanen padi dengan orang tua daripada sekolah, atau saat ujian sekalipun, lebih baik istirahat di rumah karena lelah bekerja. Hal tersebut yang menyebabkan prestasi akademik rendah, meskipun sebenarnya potensi diri mereka tidak rendah, misalnya pada skor IQ anak yang mengalami deprivasi budaya umumnya sama dengan anak lainnya, hanya karena stimulasi dan contoh yang kurang dari lingkungannya maka potensi tersebut tidak terlihat dan berkembang seperti seharusnya.

Pengembangan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk diri anak yang mengalami deprivasi budaya dan lingkungannya sangat penting untuk dilakukan secara konsisten. Menurut Riessman (1962), anak yang mengalami deprivasi budaya secara implisit dipahami sebagai deskripsi siswa yang kuat, berpusat pada konten, lambat, berorientasi eksternal, induktif, dan secara fisik berorientasi agak mirip dengan deskripsi sebelumnya oleh Sarason (1959) yaitu "berbagai taman jiwa yang rusak". Deskripsi kategori Riessman ini tampaknya dimaksudkan untuk mengingatkan para guru untuk beberapa perbedaan umum antara siswa dari kalangan ekonomi kelas bawah dan siswa dari ekonomi kelas menengah, dengan demikian guru harus kembali pada tujuan awal, yaitu menghargai semua kondisi siswa. Siswa yang mengalami deprivasi budaya perlu dibantu untuk menumbuhkan psikososial, motivasi dan prestasi belajar yang baik dan tentunya dapat menjadi *agent of change* bagi lingkungannya secara luas agar dapat memutus mata rantai deprivasi budaya.

Penelitian deprivasi banyak dilakukan oleh ilmuwan luar negeri, sedangkan di Indonesia masih sangat sedikit. Berikut penelitian yang menggambarkan tentang posisi anak yang mengalami deprivasi dalam berbagai perspektif, misalnya Lentillon, et al (2005) deprivasi penelitiannya mengkaji persepsi tentang dukungan teman-teman dan dukungan guru atas deprivasi (kekurangan) pada dirinya. Hasilnya dukungan terasa lebih rendah daripada dukungan guru, karena biasanya guru cukup bijaksana dalam menyikapi kekurangan (deprivasi) siswa. Kekurangan persepsi pada individu akan berdampak pada kepercayaan diri, motivasi belajar, bahkan pencapaian akademik.

Penelitian Fox, et al. (2011) mengungkapkan bahwa program intervensi yang dibuat berhasil membuat skor IQ (inteligensi) anak-anak meningkat, dan efek negatif dari deprivasi psikososial pada perkembangan skor IQ dapat dikurangi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Katchergin (2005) yang mengkaji antara stigma negatif yaitu tentang deprivasi budaya dan stigma positif yaitu *learning disability* (ketidakmampuan belajar). Penelitian ini adalah penelitian literatur tentang dua wacana "kekurangan" dalam pendidikan, antara *cultural deprivation* dan *learning disabilities*. Dua hal ini dikembangkan di Israel. Deprivasi budaya lahir dengan kontaminasi diri (kognitif, moral dan

tingkah lakunya). *Learning disabilities* lahir untuk merehabilitasi diri agar dapat lebih baik. Berdasarkan hal tersebut deprivasi budaya merupakan evaluasi ide dari sebuah progress perkembangan anak-anak yang sulit diperbaiki secara utuh. Sedangkan logika *learning disabilities* dapat dikategorikan sebagai sebuah ide mekanistik yang harus “memperbaiki”, meskipun seorang anak cacat dalam pembelajaran, kecacatan tersebut dapat diperbaiki.

Penelitian tentang deprivasi lebih banyak dilakukan di negara berkembang, misalnya India ditemukan 18 penelitian, beberapa diantaranya: Penelitian Tsujita (2009) *Deprivation of Education in Urban Areas: A Basic Profile of Slum Children in Delhi, India*. Venkatanarayana (2004) *Out of School Children: Child Labourers or Educationally Deprived?*, Venkatanarayana (2009) *Schooling Deprivation in India*. Dan negara maju juga melakukan penelitian tentang deprivasi yang bertujuan untuk meningkatkan terus capaian pendidikan di negara tersebut, misalnya Inggris ditemukan 11 penelitian, salah satunya adalah Cook, R. Rutt, S. and Sims, D (2014) dalam surveynya di Inggris untuk mendukung data pada *National Foundation for Educational Research (NFER) yang bertema Deprivation in Education* yang dilakukan secara berkala.

Penelitian deprivasi budaya lebih banyak mengkaji hubungan atau keterkaitannya dengan dunia pendidikan, dikarenakan faktor yang paling nyata dan mudah untuk diukur adalah faktor-faktor dalam dunia pendidikan, seperti prestasi belajar, motivasi belajar, kepercayaan diri, inteligensi, peran guru untuk anak deprivasi budaya, peran orang tua dalam pendidikan anak, dan perkembangan anak yang seharusnya terjadi dengan kenyataan, karena peran anak yang tidak sesuai, sehingga hampir semua faktor mendapat nilai rendah.

Di Indonesia, Penelitian tentang deprivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan masih sangat langka. Beberapa penelitian deprivasi yang ditemukan berkaitan dengan deprivasi relative yang berbeda sudut pandang pembahasan dari deprivasi budaya. Keduanya sama-sama mengkaji kekurangan pada perilaku namun deprivasi relatif di fokuskan pada kajian perilaku kelompok kepada kelompok lainnya atau perilaku individu pada kelompoknya atau kelompok lainnya. Sedangkan deprivasi budaya mengkaji kekurangan budaya yang merupakan kebiasaan seseorang karena mencontoh lingkungan terdekatnya yaitu

keluarga, dan model yang paling ditiru (dicontoh) seorang anak adalah orang tuanya

Berikut beberapa penelitian deprivasi yang telah dilakukan di Indonesia. Ardiansyah Rizal (2013) Pengaruh deprivasi relatif terhadap perilaku agresi anak jalanan di Lembaga Pemberdayaan Anak Negeri (LPAN) Griya Baca Kota Malang; Farurochman (1998) Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik; Noviasari & Untari (2013) Perbedaan Deprivasi Relatif Fraternal antara Etnis Cina dan Etnis Jawa; Landiyanto (2013) Kemiskinan Anak Multidimensi (Deprivasi) di Papua: Temuan Empiris dari enam Kabupaten. Kajian tentang deprivasi di Indonesia mayoritas mengangkat deprivasi relatif, dan belum ada yang secara spesifik membahas tentang deprivasi budaya yang secara langsung mempengaruhi perkembangan potensi generasi penerus bangsa, karena deprivasi merupakan kekurangan contoh (sumber) budaya baik dari orang tuanya sebagai model utama.

Penelitian Nurhidayati (2016) yang dilakukan sebagai penelitian tentang Deprivasi Budaya di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Aspek yang diukur terdiri dari 3 (tiga) aspek utama deprivasi budaya (Zac, Kirsty and Georgia, 2015), yaitu: (1) Perkembangan Intelektual, (2) Bahasa, (3) *Attitude*. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak deprivasi siswa SMP masih tergolong tinggi dan terdapat perbedaan yang signifikan karakteristik deprivasi budaya pada siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki lebih tinggi tingkat deprivasi budaya daripada siswa perempuan. Penelitian tersebut adalah upaya untuk mengetahui apakah lingkungan penelitian tersebut terdapat anak-anak yang mengalami deprivasi budaya, serta untuk mengetahui rata-rata tingkat deprivasi budaya di lingkungan tersebut.

SMP Mitra Persada Banten adalah salah satu sekolah di Indonesia yang berada di lingkungan deprivasi budaya, Jumlah siswa SMP ini adalah 373 siswa, sekolah ini tidak dikenakan biaya dan didirikan dengan tujuan ingin membantu penduduk sekitar agar memiliki pendidikan yang baik, 90% dari jumlah tersebut adalah siswa dari latar belakang keluarga kurang mampu dan 50% dari jumlah total adalah pekerja buruh tani atau ternak yang sepulang sekolah mereka langsung bekerja dan mereka juga meliburkan diri di saat waktu panen atau menuai benih. Orang tua mereka masih mewajibkan mereka untuk

memprioritaskan pekerjaan daripada pendidikan mereka, karena orangtua tidak terlalu bangga akan prestasi anaknya di sekolah, tetapi merasa sangat bangga dan puas jika anak mereka menghasilkan banyak rezeki untuk keluarga.

Keadaan lingkungan keluarga seperti ini sangat rentan akan dampak dari deprivasi budaya, karena anak-anak mereka sulit untuk mendapatkan sumber modal budaya "*cultural capital*" dari orangtua mereka sendiri, sehingga harus ada penciptaan "*cultural capital*" di lingkungan tersebut agar tidak menghambat pendidikan, peningkatan potensi yang optimum. Dalam fenomena disrupsi pada revolusi industri 4.0, lingkungan dan individu yang mengalami deprivasi budaya memiliki ketertinggalan yang cukup jauh untuk mengejar agar siap menghadapi era ini. Dampak yang signifikan terjadi adalah pada faktor psikologis, dimana teknologi informasi yang sudah mempengaruhi sebagian besar pola hidup manusia, individu sangat tergantung dengan perkembangan teknologi karena mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun sebaliknya, bagi lingkungan atau individu yang kurang bahkan tidak siap dengan perubahan seperti pada lingkungan atau individu yang mengalami deprivasi budaya, maka era ini dapat melesat meninggalkan mereka. Salah satu pengaruh revolusi industri 4.0 adalah pada sektor pendidikan sebagai sistem dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap menghadapi berbagai perubahan jaman.

Menurut sudut pandang sosiologi, pendidikan selain berperan menyiapkan manusia untuk memasuki masa depan, juga memiliki hubungan dengan transformasi sosial, begitu juga sebaliknya. Berbagai pola sistem pendidikan menggambarkan corak, tradisi, budaya sosial masyarakat yang ada. Maka yang penting diperhatikan adalah bahwa suatu sistem pendidikan dibangun guna menyiapkan peserta didik sebagai pribadi yang siap pakai pada posisi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wacana di atas menjelaskan bahwa deprivasi budaya merupakan kekurangan pada individu yang berkaitan dengan persepsi, kognitif, moral dan perilaku yang berasal dari kontaminasi lingkungan yang membuatnya sulit keluar dari budaya (kebiasaan) tersebut. Permasalahan yang digambarkan tersebut berpengaruh pada pola pikir yang seharusnya mampu merespon perkembangan lingkungan baik sekolah maupun lingkungan rumah. Lebih jauh, kondisi tersebut juga berpengaruh pada terhambatnya perkembangan aspek kognitif, moral dan perilaku secara normal.



Keterbatasan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya disebabkan oleh keadaan keluarga yang umumnya berada pada garis kemiskinan, sehingga prioritas anak mengikuti prioritas keluarga pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka tidak jarang anak yang mengalami deprivasi budaya ikut bekerja untuk membantu. Dengan keadaan demikian, budaya yang terbangun dalam keluarga umumnya adalah kesulitan untuk mengalihkan prioritas kepada pendidikan, perkembangan atau memperhatikan potensi anak. Pandangan orang tua umumnya, pendidikan hanya sebagai penunjang untuk dapat membaca dan menulis, tidak perlu pintar, berprestasi dan lain-lain. Pola pikir orang tua tersebut menjadi model anak-anak yang mengalami deprivasi budaya.

Kondisi tersebut di atas diperkuat dengan penjelasan Passow dan Eliot (1970) tentang karakteristik *cultural deprivasi* (deprivasi budaya): (1) Kekurangan Bahasa, (2) Kekurangan perceptual, (3) Modus ekspresi yang lebih rasional dan konkrit dari pada sistem ide yang terfokus, (4) Orientasi hidupnya mencari kepuasan segera dari pada menundanya untuk keuntungan masa depan, (5) Citra diri yang buruk, (6) Aspirasi terlalu sederhana untuk keberhasilan akademis, (7) Apatik dan lepas dari tujuan formal dan proses, (8) Keterbatasan berperilaku sesuai perannya dan kurangnya model orang dewasa yang baik. Passow dan Eliot menjelaskan kedelapan karakteristik jika dianalisa lebih dalam karakteristik tersebut merupakan latar belakang dari pola pikir yang sederhana. Pola pikir sederhana anak yang mengalami deprivasi budaya mempersempit langkah dan wawasannya, sehingga sulit melihat inovasi atau potensi lain di luar lingkungannya yang mungkin mereka bisa capai.

Kebijakan pemerintah dalam merespon masalah anak yang mengalami deprivasi budaya belum bersifat holistik, sehingga belum menjawab terhadap akar masalah dan masih bersifat simptomatik. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan sosial, seperti halnya program keluarga harapan (PKH) di bawah Kementerian Sosial. Program ini telah menyentuh kompetensi lingkungan terkecil yang memiliki pengaruh luar biasa yaitu keluarga. Program keluarga harapan (PKH), selain memberi bantuan dana untuk memenuhi aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain itu PKH juga memperhatikan peningkatan kemampuan keluarga, salah

satunya melalui pelatihan pengasuhan dan pendidikan anak yang diberikan kepada orang tua. PKH juga mengevaluasi progress dari setiap aspeknya.

Hasil program keluarga harapan pada aspek pendidikan, rata-rata sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walau belum mencapai hasil yang maksimal. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PKH adalah meningkatkan akses dan pemanfaatan upaya serta status pendidikan anak juga mengurangi tingkat anak putus sekolah. Namun keterlibatan PKH dalam dunia pendidikan dari anak yang menerima manfaat bantuan, hanya sampai pada tingkat kehadiran dan prestasi anak di sekolah, masalah-masalah anak di sekolah, serta kualitas proses dan pencapaian tidak dievaluasi dan dikontrol lebih jauh, karena sebaiknya PKH bekerjasama secara komprehensif dengan sekolah, yang saat ini baru pada masalah administratif. Hal tersebut memerlukan kolaborasi pada lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi sekolah secara langsung.

Program Lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Pendidikan Kesetaraan Khusus (paket A, B dan C), Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Program-program tersebut umumnya adalah bantuan dana, dan pencapaian belum menyentuh kebutuhan psikologis secara komprehensif yang dapat membantu meningkatkan potensi anak-anak deprivasi budaya melalui kesadaran dan keinginan serta cita-citanya sendiri (pola pikir seharusnya). potensi anak yang dibangun berdasarkan kesadaran dan keinginan dirinya sendiri membawa dampak positif pada penggunaan berbagai bentuk bantuan termasuk bantuan dana, sehingga seiring dengan hal tersebut peningkatan potensi anak deprivasi budaya bukan hanya pada kuantitas, namun meningkatkan kualitas yang akan diikuti oleh kuantitas.

Peningkatan potensi anak yang mengalami deprivasi budaya berdasarkan kesadaran dan keinginan (pola pikir seharusnya) dirinya sendiri memerlukan pendekatan yang menyentuh sistem kehidupan nyatanya (*real life system*). *Real life system* (RLS) di lingkungan deprivasi budaya dapat dikaji dari kebutuhan dasarnya yaitu “hidup dan bekerja”, keberlangsungan hidup dimaknai bagaimana dapat membiayai hidup dengan bekerja tanpa dibekali dengan ilmu dan

keterampilan yang cukup. Contoh yang diwarisi kepada generasi penerus mereka akhirnya membawa dampak pola kehidupan tersebut sulit untuk diputus. Membantu lingkungan deprivasi budaya memutus budaya tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk “belajar” agar potensi yang mereka miliki dapat dikembangkan. Budaya “belajar” masuk dalam *real life system* di lingkungan deprivasi budaya tentunya tidak mudah karena akan terjadi pasang surut prioritas antara bekerja dan belajar, artinya dibutuhkan satu kondisi belajar yang tidak meninggalkan bekerja sehingga makna “hidup” yang sesungguhnya menurut mereka tidak hilang.

Dalam kajian deprivasi budaya, *real life system* (RLS) menurut Sanusi (1998) mencakup satuan-satuan, dan manusia masuk pada satuan pribadi, satuan kemasyarakatan, dan satuan kealaman, biologis, kimiawi dan fisikal. Semua satuan tersebut mempertahankan hidupnya sendiri dan member bantuan fungsional bagi kehidupan satuan yang lain. Hidup-belajar-bekerja merupakan satuan pribadi dalam *real life system* (RLS) di lingkungan deprivasi budaya, sedangkan satuan kemasyarakatan yang dapat mendukung dan perlu memahami serta beradaptasi dengan satuan pribadi di atas yaitu keluarga, sekolah dan siswa sendiri serta disupport masyarakat setempat. Harmonisasi kedua satuan di atas adalah harmonisasi minimal yang harus diwujudkan melalui program-program pemerintah maupun non pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan, karena menurut Sanusi (1998) setiap satuan RLS tumbuh mendewasa di dalam lingkungan internalnya, yaitu bersatu padu di antara unsur-unsur dan bersama dengan pasangan-pasangan internalnya. Penting untuk dicatat bahwa suatu RLS tidak mungkin mandiri sepenuhnya, sebab ia memerlukan hubungan fungsional pula dengan lingkungan luarnya. Setiap satuan RLS saling membutuhkan satu terhadap lainnya.

Hal-hal yang telah digambarkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen yang menjadi penting untuk diteliti yaitu: (1) anak yang deprivasi budaya, (2) perkembangan pola pikirnya, dan (3) pendekatan pendidikan yang tepat bagi anak yang mengalami deprivasi budaya melalui pemahaman kehidupan nyata. Hal ini berarti pendekatan tersebut mampu membuat anak yang mengalami deprivasi budaya memahami dan

mengembangkan potensi dirinya melalui pemahaman terhadap kehidupan nyatanya sendiri.

Keseimbangan *real life system* (RLS) anak yang mengalami deprivasi budaya adalah keseimbangan dan sinkronisasi antara hidup-belajar-bekerja dengan baik. Untuk mewujudkannya perlu kolaborasi berbagai pihak yaitu sekolah, orang tua dan anak. Peran sekolah untuk menyeimbangkan hidup-belajar-bekerja adalah melalui guru bimbingan dan konseling didukung oleh guru bidang studi. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam konsep pendidikan yang berbasis *real life system* perlu dibangun untuk memfasilitasi dilema antara kebutuhan dan kewajiban anak yang mengalami deprivasi budaya, agar semua dapat berjalan beriringan dengan baik. Konsep pendidikan berbasis *real life system* akan mengacu pada kondisi real anak yang mengalami deprivasi budaya dan melibatkan satuan kemasyarakatan sebagai *social support*, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

Konsep pendidikan berbasis RLS adalah proses bimbingan kepada anak/siswa untuk mengenal kondisinya sekarang (satuan internal) dan memahami serta menyadari bahwa dirinya membutuhkan pengembangan diri/perubahan untuk masa depan lebih baik (satuan eksternal). Dalam pendidikan berbasis RLS, bimbingan berbasis RLS memiliki peran sangat penting dan tidak dapat berdiri sendiri karena keterbatasan jumlah personil dan kapasitas waktu dan peran yang harus dibagi dengan guru-guru lain (mata pelajaran), maka dibutuhkan konsep pembelajaran berbasis RLS yang bersifat bimbingan untuk mendukung keberhasilan bimbingan berbasis RLS. Seperti yang telah dijelaskan di atas, peran orang tua yang peduli dengan pendidikan anak dibutuhkan karena orang tua menjadi model utama dan pertama anak sehari-hari. Orang tua dari anak yang mengalami deprivasi budaya yang memiliki latar belakang pendidikan rendah membuat mereka kurang memahami bagaimana seharusnya memperhatikan pendidikan anak, oleh karena itu peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung konsep bimbingan berbasis RLS.

Bimbingan berbasis RLS, pembelajaran berbasis RLS dan orang tua yang peduli pendidikan berada pada kesatuan konsep pendidikan berbasis RLS. Pendidikan berbasis RLS yang diterapkan secara konsisten akan merubah pola

pikir anak yang mengalami deprivasi budaya tentang *real life system* (RLS)nya sendiri (hidup-belajar-bekerja) yang seharusnya.

Program yang komprehensif untuk mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya memerlukan pendidikan yang memahami kenyataan hidup yang dialaminya. Konsep pendidikan berbasis RLS dapat membantu mewujudkan hal tersebut, karena merupakan kolaborasi antara sekolah (guru bimbingan dan konseling serta guru bidang studi), orang tua yang memberikan dukungan yang berbasis pada kehidupan nyata, sehingga memberikan dukungan peduli pendidikan anak, serta peran anak (siswa) itu sendiri secara aktif dalam mengikuti bimbingan dan pembelajaran berbasis RLS.

Dalam kerangka menjawab permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian yang mendalam tentang formulasi kerangka pendidikan yang tepat dan sesuai dengan sistem kehidupan nyata (*real life system*) untuk anak yang mengalami deprivasi budaya. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pendidikan yang mampu mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Deprivasi budaya yang dialami siswa berdampak pada pengembangan pola pikir dan pencapaian pendidikannya.
2. Belum adanya program dan kerangka kerja pemerintah maupun swasta yang dilandasi penelitian ilmiah dan fokus pada optimalisasi perkembangan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya.
3. Belum adanya model pendidikan yang dapat lebih menjawab kebutuhan anak yang mengalami deprivasi budaya.
4. Belum adanya pemecahan masalah yang menyentuh satuan pribadi *real life system* (hidup, bekerja, dan belajar) anak yang mengalami deprivasi budaya.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

“Apakah pendidikan berbasis *real life system* (RLS) dapat mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya?”

Rincian rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang terjadi pada anak yang mengalami deprivasi budaya?
2. Bagaimanakah gambaran pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya?
3. Intervensi apakah yang dapat mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya?
4. Apakah pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya dapat berkembang setelah intervensi?
5. Bentuk kebijakan seperti apa yang dapat mendukung pelaksanaan sistem pendidikan formal yang Ramah Deprivasi Budaya?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum:

Tujuan umum penelitian ini adalah menemukan rumusan model pendidikan berbasis *real life system* untuk mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya.

#### 2. Tujuan Khusus:

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Memahami gambaran secara kualitatif profil sekolah dan lingkungan sekitar dalam memaknai pendidikan dan perkembangan anak, guna untuk menentukan langkah intervensi pendidikan berbasis *real life system* yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lingkungan tersebut.
- b. Mendeskripsikan data secara kualitatif tentang faktor-faktor derivasi budaya yang berdampak pada perkembangan pola pikir anak.
- c. Merumuskan model pendidikan berbasis *real life system* untuk mengembangkan pola pikir siswa yang mengalami deprivasi budaya.
- d. Menjelaskan gambaran tingkat motivasi dan partisipasi guru, orangtua sebagai kolaborator dalam membantu siswa.
- e. Mendeskripsikan perubahan pengembangan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya pasca intervensi.
- f. Mendeskripsikan motivasi yang muncul setelah pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya berkembang.

#### D. Manfaat/Signifikan Penelitian

##### 1. Manfaat keilmuan/teoritik

Manfaat teoretik dalam penelitian ini adalah pengembangan teori deprivasi budaya, khususnya deprivasi budaya dalam bingkai karakteristik budaya Indonesia. Membangun dan mengembangkan model pendidikan berbasis *real life system* secara spesifik mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya. Kolaborasi anak, orang tua, dan guru akan menghasilkan strategi dan langkah-langkah yang lebih spesifik pada kebutuhan lingkungan deprivasi budaya. Dan penelitian ini dapat menghasilkan model pendidikan untuk sekolah yang ramah deprivasi budaya.

##### 2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Bagi Guru, dapat menjadi panduan guru baik guru bidang studi maupun guru bimbingan dan konseling, dalam menangani dan mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya di sekolah tempat bertugas dengan menerapkan proses pendidikan berbasis RLS.
- b. Bagi Kepala Sekolah, dapat menjadi gambaran dan panduan dalam menyusun program sekolah, terutama untuk mengatasi permasalahan siswa/anak yang mengalami deprivasi budaya.
- c. Bagi orang tua, dapat membantu anak dalam mengembangkan pola pikirnya dan juga motivasi dalam meningkatkan potensinya melalui perhatian dan kepedulian yang semakin baik, terutama pada pendidikan anak-anak sehari-hari. Selain itu, orang tua menjadi lebih berarti dihadapan anak-anaknya.
- d. Pemerintah Setempat (RT, RW, Lurah) dan Tokoh Masyarakat, dapat membantu pemerintah setempat untuk mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat setempat akan pendidikan, dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan deprivasi budaya di lingkungannya.
- e. Pemerintah Daerah Provinsi Banten, menjadi gambaran bagi pemerintah daerah provinsi Banten untuk merumuskan kebijakan dan penyusunan program tentang pendidikan yang mampu mengembangkan pola pikir dan

potensi anak yang mengalami deprivasi budaya melalui pendidikan yang menghargai kehidupan nyata (*real life system*) siswa.

- f. Lembaga Pemerintah, model yang dihasilkan dapat menjadi gambaran dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan pembuatan program di lembaga pemerintah terkait, seperti Kemendikbud RI, Kemensos RI dan Kemenaker RI tentang solusi pendidikan yang mampu mengembangkan pola pikir anak yang mengalami deprivasi budaya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- g. Peneliti Selanjutnya, model yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan atau ide pengembangan penelitian tentang pendidikan berbasis kehidupan nyata (*real life system*) baik untuk anak yang mengalami deprivasi budaya, maupun yang tidak.
- h. Bagi Asosiasi Bimbingan & Konseling Indonesia (ABKIN), dapat dijadikan sebagai salah satu kerangka kerja yang direkomendasikan kepada Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia dalam rangka memperluas perannya pada Bimbingan & Konseling di Populasi Khusus.